

**MODERNISASI PARTAI POLITIK DI TINGKAT LOKAL**  
**(Studi Kasus Partai Demokrat Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan**  
**Kabupaten Purworejo)**

**Iwan Hardi Saputro**

**ABSTRAC**

*The study on the modernization of the Democratic Party interesting to study. This is because in the process of modernization of the Democratic Party suffered a variety of challenges and obstacles. In addition to corruption, challenges and constraints experienced in the Democratic Party to modernization is the emergence of internal conflicts. Based on the short description, this study examines the political modernization of the Democratic Party at the local level, particularly in the district of Semarang, Salatiga, and Purworejo. This research method using descriptive research design with a qualitative approach that is supported by a simple quantitative approach.*

*The results of this study indicate that in the context of the implementation of the indicators of modern political parties, transparency in financial management reporting party associated with the use of party funds and others is quite good. However, for some sub indicators, particularly in conflict resolution mechanisms are still difficulties and needs to be addressed. Therefore, to support the modernization of the Democratic Party could solve the problem, including internal conflict through a mechanism that has been set in the AD / ART.*

*Keywords: Modernization, Political Parties, Local*

**A. PENDAHULUAN**

Partai politik menjadi penghubung utama antara masyarakat dengan negara dalam perspektif demokrasi modern. Kehadirannya sangat penting karena pada dasarnya tidak ada sistem politik yang dapat berlangsung tanpa adanya partai politik. Sebagai suatu organisasi, partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi masyarakat, mewakili kepentingan tertentu dengan jalan memberi kompromi bagi pendapat-pendapat yang bersaing, memunculkan kepemimpinan politik dan sebagai alat bantu untuk memperoleh kekuasaan dan untuk memerintah. Hal tersebut menunjukkan bahwa partai politik memiliki orientasi mewujudkan aspirasi masyarakat sekaligus memperjuangkan kepentingan umum (Macridis dalam Amal 2012:19-20).

Untuk mewujudkan aspirasi masyarakat sekaligus memperjuangkan kepentingan umum, partai politik perlu melakukan modernisasi. Tujuan modernisasi adalah pembangunan partai politik yang luwes dan kuat untuk memenuhi tuntutan-tuntutan terhadap aspirasi publik yang diajukan. Pembangunan partai politik yang luwes membutuhkan perubahan-perubahan yang signifikan, khususnya pada organ partai politik itu sendiri. Perubahan yang dilakukan partai politik tidak jarang menimbulkan permasalahan, baik permasalahan internal maupun permasalahan eksternal. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi partai

politik tersebut yang kemudian dapat menyebabkan menurunnya kepercayaan publik terhadap kinerja partai politik.

Pernyataan di atas sejalan dengan hasil survei yang dilakukan *Political Communication Institute (Polcomm Institute)*. Berdasarkan hasil survei tersebut diketahui bahwa mayoritas publik tidak mempercayai partai politik. Publik yang tidak percaya partai politik yaitu sebesar 58,2%. Kemudian yang menyatakan percaya 26,3%, dan menyatakan tidak tahu sebesar 15,5%. Tingkat kepercayaan publik ini dipengaruhi oleh krisis yang dialami sejumlah partai politik. Selain itu, beberapa faktor utama yang menjadi penyebab krisis kepercayaan terhadap partai politik adalah banyaknya kader parpol yang terjerat kasus korupsi, konflik internal partai yang muncul di publik, dan yang terakhir adanya pelanggaran etika yang dilakukan kader partai politik (Kompas 2014).

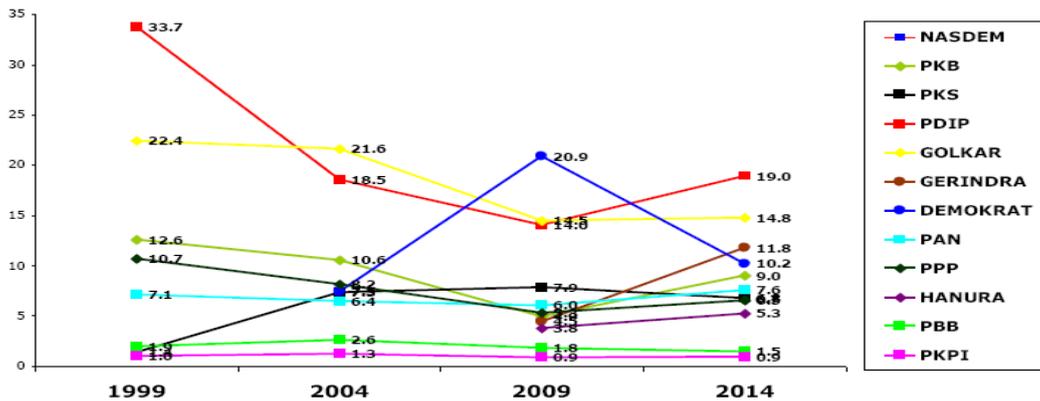
Salah satu partai politik yang mengalami dinamika seperti tersebut di atas menurut pandangan peneliti adalah Partai Demokrat. Partai Demokrat sebagai partai politik yang lahir pada masa Reformasi merupakan salah satu partai politik yang memiliki orientasi menuju modernisasi politik yang baik. Komitmen menuju ke arah modernisasi politik tersebut sudah teramanatkan di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat. Dalam AD/ART disebutkan bahwa Partai Demokrat merupakan partai politik yang modern dan terbuka bagi segenap warga bangsa. Sebagaimana tersebut sebelumnya, untuk menuju modernisasi politik, berbagai permasalahan dialami Partai Demokrat. Permasalahan yang dialami Partai Demokrat akhir-akhir ini adalah munculnya konflik internal partai dan terlibatnya sejumlah kader dalam kasus korupsi. Dampak dari permasalahan yang dialami Partai Demokrat tidak hanya dirasakan di tingkat pusat saja, melainkan juga dirasakan di tingkat lokal/daerah. Permasalahan-permasalahan yang dialami Partai Demokrat tersebut, secara tidak langsung mempengaruhi kondisi Partai Demokrat di tingkat lokal (Suasta dan Barus 2015:10).

Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa kasus korupsi yang melibatkan elit Partai Demokrat menimbulkan hubungan yang kurang baik, bahkan cenderung memunculkan konflik internal diantara elit partai. Hal ini disebabkan karena dengan adanya status tersangka Anas Urbaningrum tersebut, memaksa Anas mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua umum dan meninggalkan kursi kosong di pucuk kepemimpinan Partai Demokrat. Situasi kekosongan kepemimpinan ini sangat rawan ditumpangi berbagai pihak untuk mengejar kepentingan pribadi atau kelompok yang lebih kecil dengan membentuk faksi-faksi dalam tubuh Partai Demokrat (Suasta dan Barus 2015:25).

Selain menimbulkan konflik internal, berbagai badai permasalahan yang dialami Partai Demokrat secara tidak langsung juga berdampak pada kepercayaan publik terhadap elektabilitas Partai Demokrat. Dampak ini dapat dilihat dari menurunnya perolehan suara Partai Demokrat pada pemilihan umum (pemilu) tahun 2014. Perolehan suara Partai Demokrat pada pemilu 2014 hanya 12.728.913 (10,19%) suara. Perolehan suara tersebut jauh lebih sedikit daripada perolehan suara

Partai Demokrat pada pelaksanaan pemilu 2009. Pada pemilu 2009, Partai Demokrat memperoleh suara cukup besar, yaitu 21.703.137 suara (20,85%).

Grafik penurunan perolehan suara Partai Demokrat sebagaimana dirilis Lembaga Survei Indonesia (LSI) dapat digambarkan sebagai berikut.



Grafik 1.1 Tren Perolehan Suara Partai Politik di Indonesia  
 Sumber: Rilis LSI (2012)

Grafik di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2014 Partai Demokrat secara nasional mengalami penurunan suara cukup signifikan. Penurunan suara Partai Demokrat pada tahun 2014 menurut Ways (2015:208) berdampak pada penurunan elektabilitas partai. Penurunan elektabilitas Partai Demokrat disebabkan oleh penilaian publik yang menganggap Partai Demokrat belum mampu melakukan kaderisasi pengurus dan anggotanya secara baik sehingga banyak anggota yang melanggar visi dan misi partai.

Senada dengan permasalahan di tingkat pusat, Partai Demokrat di tingkat lokal atau daerah juga mengalami permasalahan yang relatif sama, salah satunya terjadi di Jawa Tengah. Beberapa masalah yang dialami Partai Demokrat di Jawa Tengah antara lain adanya pemberhentian lima ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) yang dianggap tidak sesuai dengan visi dan misi Partai Demokrat. Kasus pemberhentian kelima ketua DPC tersebut terjadi menjelang Kongres ke IV Partai Demokrat tanggal 11 Mei 2015. Ketua DPC yang diberhentikan antara lain Ketua DPC Kabupaten Purbalingga Muhammad Ikhsan Rakmatulloh, Ketua DPC Kabupaten Batang Mochamad Rochim, Ketua DPC Kabupaten Semarang Wibowo Agung Sanyoto, Ketua DPC Kota Salatiga Iwan Setyo Purbowo, dan Ketua DPC Kabupaten Purworejo Mohammad Abdullah (Kompas 2014).

Seperti halnya di tingkat nasional, perolehan suara di kabupaten/kota di Jawa Tengah, khususnya yang menjadi objek penelitian juga mengalami penurunan. Pada pemilihan legislatif (pileg) Partai Demokrat Kabupaten di Semarang hanya memperoleh 42.222 suara, Kota Salatiga 8502 suara, dan Kabupaten Purworejo

44.663 suara. Dengan perolehan suara tersebut, jumlah kursi yang diperoleh Partai Demokrat di Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Purworejo juga berkurang dibandingkan dengan perolehan kursi pada pileg 2009. Di Kabupaten Semarang Partai Demokrat hanya memperoleh 4 kursi, di Kota Salatiga 3 kursi, dan di Kabupaten Purworejo Partai Demokrat hanya memperoleh 4 kursi. Dari berbagai permasalahan yang dialami Partai Demokrat tersebut memunculkan pertanyaan apakah selama ini Partai Demokrat sudah diklasifikasi sebagai partai politik modern di Indonesia.

Penjelasan singkat di atas menunjukkan adanya gap antara kenyataan empirik yang dialami partai politik khususnya Partai Demokrat sebagai partai yang terbuka dan modern dengan teori tentang modernisasi dan teori partai politik modern. Secara teoretis, partai politik dibentuk dari berkembangnya pembangunan sebagai modernisasi sosial politik. Partai politik merupakan manifestasi pikiran atau kebutuhan masyarakat agar kepentingannya dapat dikabulkan oleh pemerintah. Partai politik mempunyai tujuan dan fungsi yang harus dijalankan, yaitu dengan penampungan aspirasi masyarakat yang kemudian diwujudkan melalui pemerintah.

## **B. METODE PENELITIAN**

Ditinjau dari permasalahan dan tujuan dalam penelitian ini, maka desain penelitian yang digunakan adalah desain penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif yang didukung dengan pendekatan kuantitatif sederhana. Untuk mendapatkan data yang dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini, peneliti cenderung menggunakan pendekatan kualitatif untuk menemukan data pokoknya, sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan sebagai pendukung dan hanya menunjukkan ranking saja. Pendekatan kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam dan digunakan untuk menggali informasi yang sifatnya lebih mendalam serta untuk memperjelas gambaran tentang modernisasi Partai Demokrat di Demokrat di Kabupaten Semarang. Sedangkan pendekatan kuantitatif dilakukan dengan metode survei.

Pengolahan data kuantitatif diperoleh melalui metode survei dengan menggunakan angket dan diolah menggunakan statistik deskriptif yang berupa skala likert dan prosentase. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah pengurus, kader atau simpatisan Partai Demokrat Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Purworejo pada pemilu legislatif tahun 2014. Pada pemilu legislatif Partai Demokrat di Kabupaten Semarang memperoleh suara sebanyak 42.222 suara, Kota Salatiga 8.502 suara, dan Kabupaten Purworejo memperoleh 44.663 suara. Jika kemudian diakumulasikan, ketiga Kabupaten/Kota tersebut mendapatkan suara sebanyak 9.387 suara.

Penentuan sampel dapat dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin (Riduwan 2010) yaitu :

$$n = \frac{N}{\dots}$$

$$N(e)^2 + 1$$

n = ukuran sampel  
N = populasi (pengurus, kader atau simpatisan Partai Demokrat Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Purworejo)  
e = tingkat presisi yang ditetapkan  
Dalam penelitian ini digunakan tingkat presisi ketidakteelitian 10% sehingga ukuran sampel dalam penelitian ini yaitu:

$$n = \frac{95.387}{95.387 (0,1)^2 + 1}$$

$$n = \frac{95.387 \times 0,01 + 1}{95.387}$$

n = 99, 89527  
n dibulatkan menjadi 100 sampel

Teknik pengukuran skor dalam penelitian ini menggunakan teknik penilaian skala *Likert*. Sugiyono (2014: 93) menjelaskan teknik skala *Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial, yang mana fenomena sosial tersebut telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Data yang diperoleh merupakan data kualitatif yang kemudian dikuantitatifkan.

Setelah pengambilan data melalui kuesioner selesai, maka langkah selanjutnya adalah menghitung rata-rata jawaban berdasarkan skoring setiap jawaban dari responden. Berdasarkan skor yang telah ditetapkan dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

Jumlah skor untuk responden (.....orang) yang menjawab SB x 4  
Jumlah skor untuk responden (.....orang) yang menjawab B x 3  
Jumlah skor untuk responden (.....orang) yang menjawab TB x 2  
Jumlah skor untuk responden (.....orang) yang menjawab STB x 1

Setelah ditemukan jumlah total, maka selanjutnya menghitung skor ideal (kriterium) untuk seluruh item = 4 x 91 = 364 (seandainya semua menjawab SB), maka tingkat keterbukaan Partai Demokrat dapat dihitung dengan rumus: Jumlah total : skor ideal) x 100%.

Setelah mendapatkan skor ideal, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data yang diperoleh. Sebagaimana disampaikan di awal, penelitian ini merupakan penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif yang didukung pendekatan kuantitatif sederhana (deskriptif kuantitatif). Dengan demikian, data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif yang diungkapkan dalam distribusi skor dan persentase terhadap kategori skala penilaian yang telah ditentukan. Setelah penyajian dalam bentuk

persentase, langkah selanjutnya adalah mendeskriptifkan dan mengambil kesimpulan tentang masing-masing indikator. Kesesuaian aspek dalam indikator partai politik modern

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### C.1. Modernisasi Partai Demokrat di Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Purworejo

#### C.1.1 Keterbukaan

Untuk masalah keterbukaan, berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa Partai Demokrat Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Purworejo dalam beberapa sub indikator termasuk ke dalam kategori sangat terbuka. Namun demikian, karena dinamika perpolitikan selalu dinamis, usaha untuk menuju keterbukaan tersebut mengalami berbagai kendala pada sub indikator yang lain. Salah satu indikator yang dibahas dalam bab ini adalah keterbukaan Partai Demokrat dalam memberikan akses informasi kepada kader.

Keterbukaan akses informasi merupakan salah satu hal yang penting dalam membangun partai politik menuju modernisasi. Pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan Budiarto (2008: 405-409) yang menyampaikan bahwa partai politik memiliki dua peran penting dalam komunikasi politik, yaitu sebagai penggabungan kepentingan (*interest aggregations*) dan perumusan kepentingan (*interest articulation*). Dalam proses penggabungan kepentingan (*interest aggregations*), partai politik menjadi instrumen untuk menampung pendapat atau aspirasi seseorang yang berkembang di masyarakat yang kemudian aspirasi tersebut digabungkan dengan aspirasi orang lain yang sejalan. Hal tersebut sebagaimana pernyataan Firmanzah (2008: 67-680) yang menyatakan bahwa salah satu bentuk keterbukaan partai politik dapat digambarkan melalui hubungan dialogis (semangat keterbukaan) antara elit partai dengan kadernya maupun dengan anggota masyarakat. Dengan adanya semangat keterbukaan antara *stakeholder* partai tersebut, maka akan terwujud titik temu dan keseimbangan antara apa yang diinginkan oleh masyarakat dan partai politik. Hal ini karena berdialog dimaksudkan untuk mencari kesepakatan dengan pihak-pihak yang memiliki pendapat dan kepentingan yang berbeda.

Dari berbagai pernyataan tersebut, untuk mewujudkan modernisasi, Partai Demokrat di Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Purworejo selalu berusaha memberikan informasi secara terbuka kepada kader. Hal ini dilakukan karena setiap kebijakan partai merupakan hal yang harus diberitahukan kepada masyarakat, termasuk kepada kader dan tidak boleh ditutup-tutupi. Namun demikian, dari penelitian di lapangan diperoleh data bahwa Partai Demokrat di

Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Purworejo dalam hal komunikasi sama-sama masih mengalami berbagai kendala. Salah satu kendala yang dihadapi Partai Demokrat Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Purworejo adalah belum adanya Muscab, sehingga struktur kepengurusan DPC Partai Demokrat di tiga kabupaten/kota tersebut belum tersusun dengan baik.

Indikator keterbukaan yang lain adalah transparansi dalam pengelolaan keuangan. Transparansi dalam pengelolaan keuangan merupakan salah satu indikator terwujudnya modernisasi partai politik. Oleh karena itu, sebagai partai yang mendeklarasikan partai politik modern, Partai Demokrat sudah sepatutnya mengelola keuangan secara terbuka dan transparan. Maksud dari hal tersebut adalah bahwa setiap pengelolaan keuangan harus sesuai dengan aturan yang terdapat dalam AD/ART Partai Demokrat maupun peraturan yang disepakati bersama. Upaya Partai Demokrat Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Purworejo dalam mengelola keuangannya sudah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang terdapat di dalam AD/ART atau peraturan partai. Mekanisme yang dimaksud adalah dengan memberikan laporan dalam bentuk tertulis kepada KPU Kabupaten Semarang (jika menyangkut dengan keuangan dana kampanye) maupun dengan BPK (jika menyangkut dengan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

### **C.1.2 *Pelaksanaan Ideologi***

Ideologi merupakan faktor penting untuk mendukung terwujudnya modernisasi. Hal ini berangkat dari pernyataan Prasetyo (2011: 6) yang menyatakan bahwa ideologi memiliki peran besar memberikan arah bagi partai politik untuk menjalankan fungsinya. Dengan dasar ideologi, partai politik dapat menjalankan fungsinya melalui program kerja kebijakan partai, yang kemudian akan diimplementasikan dalam wujud kerja nyata yang hasilnya dapat dirasakan masyarakat secara keseluruhan.

Gambaran tentang pelaksanaan Ideologi Partai Demokrat di Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Purworejo salah satunya dapat dilihat dalam konteks keberagaman anggota/kader. Partai Demokrat Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Purworejo dapat dikatakan partai yang pluralis, yaitu partai yang menyadari kenyataan sejarah bahwa bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku, ras, agama dan budaya, dan dari keragaman itu telah lahir solidaritas nasional menghadapi penjajahan hingga lahirnya Negara Republik Indonesia. Manajemen keragaman itu dimungkinkan karena adanya semangat Bhineka Tunggal Ika, yakni meski ada identitas yang berbeda-beda tetapi pada hakikatnya adalah satu kesatuan, yaitu

kesatuan bangsa Indonesia. Tugas menyatukan keragaman bukan dengan menyeragamkan yang beragam, tetapi menyatukan visi dari kekuatan yang beragam. Oleh karena itu, dalam mewujudkan hal tersebut Partai Demokrat Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Purworejo memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap solidaritas pada masing-masing kader partai.

### ***C.1.3 Proses Regenerasi***

Regenerasi dalam partai politik berkaitan dengan bagaimana partai politik melakukan rekrutmen terhadap anggota. Artinya, berhasil dan tidaknya partai politik salah satunya juga ditentukan melalui proses regenerasi. Terkait dengan regenerasi, Partai Demokrat di Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Purworejo terbuka untuk semua kader yang mempunyai niat atau motivasi untuk menjadi pengurus partai, bahkan menjadi calon ketua DPC. Pencalonan Ketua DPC secara demokratis dilaksanakan pada saat Muscab, dan siapa pun kader mempunyai hak untuk mencalonkan diri, tanpa mengistimewakan pihak-pihak tertentu, termasuk pihak-pihak yang memiliki dana yang besar.

Untuk syarat menjadi Ketua DPC atau Sekretaris minimal harus melakukan koordinasi dengan semua PAC-PAC yang ada di Kabupaten Semarang. Hal ini perlu dilakukan karena setiap PAC memiliki hak suara dalam Muscab yang diselenggarakan. Melalui konsolidasi dengan PAC kemudian PAC mengumpulkan kader-kadernya dari ranting dikumpulkan ini nanti ada pemilihan ini itu nanti semuanya dikumpulkan untuk membahas pemilihan.

Selain keterbukaan dalam rekrutmen kader yang akan menjabat sebagai pengurus, dalam usaha melakukan proses regenerasi yang baik, Partai Demokrat Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Purworejo juga berpedoman pada usaha yang akan dilakukan DPP, yaitu melalui penyelenggaraan institut Partai Demokrat. Institut Partai Demokrat perlu diberikan kepada kader agar kader mendapatkan pendidikan dan pembelajaran politik, khususnya yang terkait dengan kondisi Partai Demokrat. Tujuan dari diselenggarakannya institut Partai Demokrat adalah untuk menyiapkan kader terbaik. Apalagi pada saat ini Partai Demokrat masih mempertahankan SBY sebagai patron partai, sehingga memunculkan kekhawatiran mengenai anggapan bahwa Partai Demokrat tidak demokratis.

### ***C.1.4 Kaderisasi***

Dalam proses kaderisasi, sesuai dengan AD/ART setiap DPC Partai Demokrat memiliki sebuah unit khusus yang dinamakan Unit Kaderisasi, Pendidikan dan Pelatihan. Unit Kaderisasi, Pendidikan dan Pelatihan bertanggungjawab melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan kaderisasi secara teratur dan secara insidental sesuai dengan kebutuhan semua kader dan fungsionaris partai di tingkat cabang. Dalam melaksanakan tugasnya, unit tersebut berpedoman pada Rencana Umum Pendidikan dan Pelatihan serta Kebijakan serta kebijakan Umum Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Pimpinan Cabang.

Melalui Unit Kaderisasi, Pendidikan dan Pelatihan Kaderisasi oleh pengurus Partai Demokrat dipahami lebih dari pemberian materi atau indoktrinasi secara formal melalui ruang-ruang kelas tetapi juga sebagai pengikutsertaan anggota atau jajaran pengurus lain dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh partai, seperti rapat-rapat dan kunjungan ke PAC, sehingga unit kaderisasi sebagai bagian struktur organisasi partai, bersama fungsionarisnya tidak lebih sebagai papan nama jika ditinjau dari fungsi unit tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Partai Demokrat di Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Purworejo, diperoleh data bahwa Unit Kaderisasi, Pendidikan dan Pelatihan pada saat ini belum menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini dikarenakan belum matangnya proses perencanaan. Kurang matangnya proses perencanaan salah satunya disebabkan karena adanya pergantian kepengurusan di tubuh Partai Demokrat di Kabupaten Semarang sebelum dilaksanakan Muscab. Hal ini berpengaruh terhadap struktur kepengurusan partai, sehingga tugas dari masing-masing pengurus menjadi tidak jelas.

### **3.2 Tantangan dan Hambatan Modernisasi Partai Demokrat di Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Purworejo**

Terkait dengan modernisasi, berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pada saat ini Partai Demokrat di Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Purworejo masih dalam proses menuju modernisasi atau dengan kata lain menuju partai politik modern. Dalam upaya menuju partai politik modern, Partai Demokrat di tiga kabupaten/kota tersebut mengalami berbagai tantangan dan hambatan. Salah satu hambatan yang dialami adalah kurangnya komunikasi antara pengurus di DPC dengan pengurus atau kader yang berada di bawahnya (PAC). Kurangnya komunikasi antara DPC dan PAC ini disebabkan karena sampai pada tahun 2016, Partai Demokrat di tiga kabupaten/kota tersebut belum mengadakan Musyawarah Cabang (Muscab). Muscab terakhir dilaksanakan pada tahun 2006.

Selain alasan-alasan di atas, hambatan lain yang dihadapi Partai Demokrat untuk menuju partai politik modern adalah masih ketergantungannya

Partai Demokrat terhadap salah satu tokoh elit sentral, yaitu SBY. Dari penelitian yang dilakukan di Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Semarang, menurut hasil wawancara yang dilakukan menyatakan bahwa untuk saat ini dengan melihat kondisi Partai Demokrat yang mengalami berbagai permasalahan, maka Partai Demokrat belum bisa terlepas dari bayang-bayang SBY. Partai Demokrat masih membutuhkan kepemimpinan SBY. Ketokohan SBY masih menjadi magnet bagi para calon kader untuk masuk menjadi anggota Partai Demokrat. Sebagian dari calon kader beralasan bahwa SBY merupakan sosok panutan yang menjadi daya tarik kader untuk menjadi bagian dari Partai Demokrat.

Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Legowo (2011). Menurut Legowo, untuk menuju modernisasi, Partai Demokrat setidaknya menemui tiga tantangan. Tantangan pertama modernisasi Partai Demokrat, yakni: melangsungkan transformasi daya tarik SBY menjadi daya tarik partai. Postur yang mengesankan, gagasan cermelang, perilaku terpuji, serta komitmen, konsistensi dan disiplin yang teguh yang ada dalam diri SBY harus dapat dialihkan dan tertanam sebagai karakter utama partai. Ditambah dengan inisiatif-inisiatif kreatif, inovatif dan bertanggungjawab dari aktivis-aktivisnya, proses transformasi ini makin terlengkapi. Publik harus bisa diyakinkan bahwa daya tarik partai lebih memikat daripada daya tarik tokoh-tokohnya. Hal ini juga dilakukan untuk menjawab keraguan publik terhadap elektabilitas Partai Demokrat.

Tantangan kedua adalah depersonalisasi organisasi. Artinya, untuk menuju modernisasi, Partai Demokrat harus makin tidak terikat pada, dan menjadi lepas dari, ikatan dan urusan pribadi tokoh dan anggotanya. Dalam pengembangannya, partai harus menjadi milik bersama para anggotanya, bukan milik pribadi (para) tokohnya. Maka simbol-simbol atau tanda-tanda kerikatan partai pada perorangan harus semakin diminimalisir, yang berbarengan dengan itu simbol-simbol kepemilikan bersama partai harus makin ditingkatkan dari waktu ke waktu. Beberapa upaya yang dapat dilakukan depersonalisasi Partai Demokrat adalah dengan melakukan penertiban dan penegakan disiplin iuran anggota. Hukum iuran adalah wajib. Anggota tidak memberikan iuran harus dikenai sanksi. Iuran ini menjadi bukti bagi setiap anggota memiliki saham yang sama bagi keberadaan partai. Berpasangan dengan iuran wajib adalah pembatasan jumlah donasi atau sumbangan sukarela dari anggota maupun non-anggota, dan yang harus diumumkan secara terbuka, untuk menghindari ketergantungan partai pada pendonor besar dan dominan.

Tantangan yang ketiga adalah penggalangan dukungan masyarakat melalui kader-kader partai yang bekerja untuk masyarakat, utamanya pada lapisan akar rumput. Ini mengasumsikan partai mempunyai kader-kader orisinal yang dilahirkan dari kegiatan kaderisasi partai. Tugas kader adalah mengkomunikasikan partai dan programnya kepada masyarakat secara luas; membantu menyelesaikan masalah-masalah kemasyarakatan; dan menghimpun keluhan, kebutuhan dan kepentingan yang harus ditangkap sebagai aspirasi yang

berkembang di masyarakat. Lapisan akar rumput harus menjadi target layanan kader yang utama, karena menjadi bagian dari masyarakat yang paling rentan menjadi korban, dan paling tidak punya akses terhadap sumber-sumber, pembangunan. Tantangan lain yang harus dihadapi Partai Demokrat untuk mewujudkan modernisasi adalah dengan melakukan proses transformasi dari partai simpatisan/massa menjadi partai kader.

Gambaran tentang tantangan dan hambatan yang dialami Partai Demokrat di Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Purworejo, dapat ditampilkan secara jelas di dalam matrik berikut ini.

**Tabel 3.1 Tantangan dan Hambatan Modernisasi Partai Demokrat di Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Purworejo**

<b>Tantangan/Hambatan</b>	<b>Deskriptif Analisis</b>
Komunikasi antara elit Partai Demokrat dengan kader di Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Purworejo berjalan kurang baik	Penyebab ku yang baiknya komunikasi antara elit dengan kader di bawahnya disebabkan karena adanya keterlambatan pelaksanaan Muscab dan pergantian kepengurus di tingkat DPC yang tidak dilaksanakan melalui Muscab
Partai Demokrat di Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Purworejo terhadap sosok SBY	a yang diperoleh, pada saat ini Partai Demokrat di tiga kabupaten/kota tersebut belum mampu keluar dari bayang-bayang SBY.
terhadap AD/ART Partai Demokrat	rtentu Partai Demokrat melanggar AD/ART partai

Dari berbagai hasil temuan data terkait dengan konflik internal partai, maka meskipun secara kuantitatif diperoleh data bahwa Partai Demokrat sudah modern, namun secara kualitatif untuk menuju modern, Partai Demokrat masih mengalami berbagai kendala. Berbagai pendapat terkait dengan hal tersebut antara lain disampaikan oleh beberapa narasumber yang peneliti wawancarai, yaitu sebagai berikut.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa Partai Demokrat, khususnya di bawah naungan DPD Provinsi Jawa Tengah selalu berusaha untuk menjadi partai yang terbuka. Dengan keterbukaan, para kader diberikan ruang bebas untuk dapat melakukan kritik terhadap kebijakan atau keputusan partai. Namun demikian, kritik tersebut kadang juga menimbulkan permasalahan bagi Partai Demokrat sendiri. Artinya, beberapa hal yang seharusnya menjadi rahasia partai justru muncul di media, dan kadang dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak menginginkan adanya keharmonisan di Partai Demokrat. Oleh karena itu, dalam

penyampaian kritik menurut Ali Mashadi hendaknya disampaikan melalui mekanisme internal terlebih dahulu, dan tidak langsung menyampaikan rapat di media. Hal ini sesuai dengan pesan SBY “*meskipun terbuka, namun untuk permasalahan internal hendaknya sama-sama duduk bersama untuk menyelesaikan konflik untuk mencari titik temu atau solusi*”.

Partai Demokrat dalam menuju modernisasi harus menjadi partai kader bukan lagi menjadi partai simpatisan. Dengan menjadi partai kader, maka pengurus DPAC harus siap dicalonkan sebagai Angoota Dewan, sehingga kader yang dicalonkan akan memiliki jaringan dan tidak menjadi pengangguran. Karena jika Partai Demokrat masih menggunakan cara lama (tradisional) dalam mengelola partai, maka sampai kapanpun Partai Demokrat tidak bisa menjadi modern dan terbuka. Model partai kader yang dimaksud ini adalah melalui pendidikan dan pelatihan yang berisi tentang pemahaman tentang apa itu Partai Demokrat, mengapa harus memilih Partai Demokrat, apa ideologinya dan lain sebagainya. Salah satu upaya untuk mendukung hal tersebut adalah dengan mendirikan Institut Partai Demokrat.

## **D. PENUTUP**

### **D.1 Simpulan**

Setelah selesai melakukan analisis dan pembahasan terhadap hasil penelitian, peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal terkait dengan proses modernisasi partai politik di tingkat lokal, khususnya yang terjadi pada Partai Demokrat di Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut.

1. Dalam mewujudkan modernisasi, Partai Demokrat di Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Purworejo melakukan beberapa upaya yang sama, diantaranya dengan melakukan konsolidasi yang bersifat *bottom up*, baik dengan DPD, DPC, PAC, maupun dengan partai politik yang lain. Dalam konteks pelaksanaan indikator partai politik modern, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan partai (terkait dengan pelaporan penggunaan dana partai dan lain-lain) tergolong bagus. Namun, dalam mekanisme penyelesaian konflik masih mengalami berbagai kendala. Partai Demokrat melakukan institut Partai Demokrat sebagai upaya mencari kader terbaik yang dalam jangka panjang akan menjadi pemimpin DPC di masa yang akan datang.
2. Dalam mewujudkan modernisasi, Partai Demokrat di Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Purworejo mengalami beberapa hambatan sekaligus tantangan, diantaranya munculnya konflik internal yang disebabkan karena adanya pemberhentian ketua DPC. Konflik internal memberikan dampak terhadap pelaksanaan fungsi kepengurusan pada masing-masing DPC Partai Demokrat tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa faktor yang menghambat modernisasi antara lain kurangnya komunikasi, belum diadakannya Muscab, korupsi, dan konflik

internal. Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan di lapangan diperoleh data bahwa saat ini Partai Demokrat belum dapat dikatakan sebagai partai modern di Indonesia. Hal ini dikarenakan Partai Demokrat belum mampu keluar dari kekharismaan SBY sebagai tokoh sentral Partai Demokrat. Kebanyakan kader menyampaikan bahwa saat ini ketertarikan untuk bergabung dengan Partai Demokrat bukan dikarenakan program-program partai tersebut bagus, melainkan terdapat sosok SBY pada Partai Demokrat.

## **D.2 Saran**

Saran yang dapat peneliti rekomendasikan sebagai berikut.

1. Untuk menjadi partai politik modern, hendaknya Partai Demokrat dapat menyelesaikan permasalahan, termasuk konflik internal melalui mekanisme yang sudah diatur di dalam AD/ART. Hal ini dikarenakan di dalam AD/ART termuat pedoman-pedoman yang mengatur kehidupan berorganisasi. Oleh karena itu, untuk menghindari konflik internal yang kemudian menyebabkan perpecahan, maka hendaknya semua elemen Partai Demokrat, baik elit maupun kader dapat secara konsisten melaksanakan tuntutan-tuntutan AD/ART, sehingga arogansi politik di tubuh Partai Demokrat dapat diminimalisir. Partai Demokrat seharusnya mulai mempersiapkan sosok kader yang dapat membawa pada perubahan politik yang lebih baik, sehingga tidak hanya tergantung pada sosok SBY sebagai mesin untuk mendulang suara partai.
2. Partai Demokrat perlu melakukan upaya yang simultan dan komprehensif untuk melaksanakan modernisasi. Upaya ini harus diupayakan dengan segera mengingat bahwa modernisasi politik sangat berpengaruh bagi kehidupan demokrasi ditingkat lokal maupun nasional. Partai Demokrat untuk menuju modernisasi harus menjadi partai kader bukan partai simpatisan. Selain itu, terkait dengan hal tersebut Partai Demokrat hendaknya senantiasa meningkatkan komunikasi secara konsisten, baik dengan anggota partai maupun pihak luar.

## **DAFTAR RUJUKAN**

### **Buku:**

- Amal, Ichlasul ed. 2012. *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Apter, David, E. 1988. *Pengantar Analisis Politik*. Jakarta: Kincir Buana.
- Bagir, Manan. 2012. *Politik Publik Pers*. Jakarta: Dewan Pers.
- Bastian, I. 2007. *Akuntansi untuk LSM dan Partai Politik*. Edisi pertama. Jakarta: Erlangga.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, John. W. 2003. *Research Design: Qualitative and Mixed Methods Approach*. Thousand Oak: Sage Publication Inc.

- \_\_\_\_\_. 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Crotty, William. 2014. "Asal-Usul dan Evolusi Partai di Amerika Serikat". *Handbook Partai Politik*. Bandung: Nusa Media.
- Fadjar, Abdul Mukthie. 2013. *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Firmanzah. 2008. *Mengelola Partai Politik Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Harjanto, Nicolaus Teguh Budi. 1997. *Memajukan Demokrasi Mencegah Disintegrasi; Sebuah Wacana Pembangunan Politik*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.
- Huntington, Samuel P. 1973. *Political Order in Changing Societies*. New Haven and London. Yale University Press.
- Hunt, M.P. and Metcalf, L., . 1996. Ratio and inquiry on Society's Closed Areas, in *Educating The Democratic Mind* (W. Parker) New York: State University of New York Press.
- Ishiyama, John T. dan Marijke, Breuning ed. 2013. *Ilmu Politik Dalam Paradigma Abad Kedua Puluh Satu Sebuah Referensi Panduan Tematis Jilid 2*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
- Johnson, Doyle Pul. 1994. *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Lembaga Survei Indonesia. (2012). *Perubahan Politik 2014: Tren Sentimen Pemilih pada Partai Politik*.
- Meyer, Thomas. 2012. *Peran Partai Politik Dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis*. Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES).
- Narimawati, Umi. 2007. *Riset Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Agung Media.
- Pruitt, Dean G dan Rubin, Jeffrey Z. 2009. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Rubbin dan Judge. 2008. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sartoni, Geovanni. 2005. *Parties and Party Systems: A Framework for Analysis*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sarwono, Jonathan. 2013. *Strategi Melakukan Riset Kuantitatif, Kualitatif, Gabungan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sokhey, Sarah Wilson. 2013. "Perkembangan Politik dan Modernisasi". *Ilmu Politik dalam Paradigma Abad Ke-21 Sebuah Referensi Panduan Tematis Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Susan. 2009. *Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Strauss, Anselm dan Corbin Juliet. 1990. *Basics of Qualitative Research : Grounded Theory Procedures and Techniques*. Sage. London, United Kingdom.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Kompas Gramedia.

- Sutopo, H, B. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Suwarsono, Alvin Y. So. 2006. *Perubahan Sosial dan Pembangunan di Indonesia: Teori-teori Modernisasi, Dependensi dan Sistem Dunia*. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial. p. 95-204.
- Sztompka, Piotr. 2007. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Tandjung, Akbar. 2007. *The Golkar Way Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Varma, SP. 2007. *Teori Politik Modern*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ways, Muliansyah, Abdurrahman. 2015. *Political Ilmu Politik, Demokrasi, Partai Politik & Welfare State*. Yogyakarta: Buku Litera.
- Wirawan. 2010. *Konflik dan Manajemen Konflik Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika.
- White, John Kenneth. 2014. "Apakah Partai Politik Itu?" *Handbook Partai Politik*. Bandung: Nusa Media.
- (Suasta dan Barus 2015:10).
- Jurnal dan Tesis/Desertasi:**
- Abdillah, Masykuri. 2013. *Hubungan Agama dan Negara dalam Konteks Modernisasi Politik di Era Reformasi*. Jakarta, No.2.vol.XIII. hal. 247-258.
- Anto, Djawamaku. 2005. "Percehan Partai Politik, Pemberantasan Korupsi dan Berbagai Masalah Politik Lainnya"; dalam Jurnal Analisis CSIS: *Peran Masyarakat dan Demokrasi Lokal*, Jakarta, No.2.vol. 34. hal 126-127.
- Kurniasih, Dewi. Dan Tatik, Rohmawati. 2013. *Pelaksanaan Fungsi Komunikasi Politik Partai Demokrat (Studi Pemilihan Walikota Bandung)*. No. 2. vol 11. hal 234-261.
- Prasetya, Imam Yudhi. 2011. *Pergeseran Peran Ideologi dalam Partai Politik*. No. Vol 1. Hal 30-40.
- Hanapiah, Pipin, 2012. *Perubahan Politik Golongan Karya: Studi Interaksi Pengurus Partai Golkar Kota Bandung di Era Reformasi*. Bandung: Program Pascasarjana FISIP UNPAD.
- Harjanto, Budi NT, *Studi Pembangunan Politik: Dari Modernisasi ke Demokratisasi*. ANALISIS CSIS, Tahun XXVII/1998, No. 2. Karim, Rusli M, *Peluang dan Hambatan Demokratisasi*. ANALISIS CSIS, Tahun XXVII/1998, No. 10.
- Website:**
- DPD Demokrat Jateng: Pemberhentian 5 Ketua DPC Salah Prosedur*. (2014). Dalam <http://regional.kompas.com>. Diunduh pada tanggal 24 Maret 2016 pukul 10.09.
- Partai Demokrat Ancam Gelar Kongres Tandingan Kaukus Penyelamat*. (2015). Dalam <http://news.metrotvnews.com>. Diunduh tanggal 4 Januari 2016 pukul 11:11.
- Survei: Mayoritas Publik Tak Percaya Partai Politik*. (2014). Dalam <http://nasional.kompas.com>. Diunduh pada tanggal 24 Mei 2016 pukul 07.57 WIB.
- Terbuka Bukan Pilihan, tapi Keharusan*. (2016). Dalam <http://www.demokrat.or.id>. Diunduh tanggal 8 April 2016 pukul 19:30.
- Undang-undang**

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2015. Jakarta:  
Sekretariat DPP Partai Demokrat Direktur Eksekutif.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 tentang Perubahan Peraturan  
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai  
Politik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.  
Bandung: Citra Umbara.